

Mengembangkan Asa Pertumbuhan Ekonomi

Oleh

HANS Z. KAIWAI*

pada rendahnya penyerapan APBD 2015 yang dapat mengakibatkan kurangnya daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Serapan Anggaran

Per 30 Juni 2015, secara nasional tingkat penyerapan APBD 2015 untuk provinsi rata-rata baru mencapai 25,9 persen, dan kabupaten/kota mencapai 24,6 persen. Sementara itu dana PEMDA yang mengendap di bank pada triwulan II (April-Juni) 2015 dilaporkan sebesar Rp 273,5 triliun.

Dana idle PEMDA tersebut dipandang turut memberikan kontribusi pada rendahnya pertumbuhan ekonomi pada semester I 2015. Walaupun atas dana yang mengendap di bank tersebut PEMDA mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga, tetapi jauh lebih optimal jika dapat direalisasikan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal.

Rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan I dan triwulan II merupakan masalah klasik APBD yang dapat kita amati dari tahun ke tahun. Tingkat penyerapan anggaran akan mulai meningkat pada triwulan III dan terutama pada triwulan IV (Oktober-Desember).

Seperti mengejar jam tayang dalam produksi sinetron, realisasi dana pembangunan akan digenot oleh Pemda pada saat-saat terakhir dimana akan memasuki penutupan tahun anggaran. Dan jika tidak habis dibelanjakan, selanjutnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Pola penyerapan anggaran yang minim realisasi pada triwulan I dan triwulan II dan akan meningkat drastis pada triwulan IV seperti ini masih berulang juga di tahun ini maupun tahun yang akan datang. Di sisi lain kalau kita amati pola pergerakan simpanan PEMDA di

bank biasa meningkat pada bulan April, kemudian meningkat lagi pada bulan Juni, dan meningkat lagi pada bulan September. Pola seperti ini ada hubungannya dengan pola tahapan penyaluran dana transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Tantangan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun terutama anggaran 2015 diharapkan menjadi pelajaran Pemda untuk menerima tantangan penyerapan anggaran yang bertambah besar lagi di tahun anggaran 2016.

Ketika mencermati postur RAPBN 2016 yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, kita mendapati beberapa hal yang menarik terkait desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini.

Dana transfer ke daerah dan dana desa pada RAPBN 2016 meningkat 17,7 persen dari APBNP 2015. Dana transfer ke daerah meningkat menjadi Rp 735,2 triliun dari Rp 643,8 triliun, dan dana desa meningkat menjadi Rp 47,0 triliun dari 20,8 triliun.

Hal menarik lainnya adalah untuk pertama kalinya besaran dana transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja kementerian/ lembaga. Saatnya momentum membangun dari pinggir dengan memperkuat daerah dan desa. Dengan demikian pendulum anggaran pembangunan melalui belanja negara mulai bergerak ke daerah.

Pada satu sisi peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa yang signifikan merupakan berita menggembirakan, namun pada sisi lainnya pemerintah daerah dan pemerintah kampung ditantang untuk meningkatkan daya serap anggaran baik pada tahun anggaran berjalan 2015, maupun pada tahun anggaran 2016 yang akan datang.

Akselerasi Fiskal Daerah

Menganggurnya dana pembangunan di bank perlu dikritisi oleh publik atas pengelolaan keuangan publik oleh PEMDA terutama jika urusan pelayanan publik dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang belum tercapai sementara ada sejumlah dana pembangunan mengendap di bank dengan maksud untuk memperoleh pendapatan bunga dan jasa giro.

Hal ini perlu dicermati bersama berapa jumlah simpanan yang 'dinilai wajar' dan 'berapalama' disimpan. Pengendapan dana yang berorientasi semata-mata pada meraup

pendapatan bunga tanpa memperhatikan manajemen kas dan realisasi program pembangunan, perlu dipandang sebagai perilaku PEMDA yang mengesampingkan pelayanan publik dan kepentingan rakyat banyak.

Untuk itu Pemda diharapkan dalam empat bulan yang tersisa pada tahun anggaran 2015 ini segera merealisasikan anggaran pembangunan termasuk proyek infrastruktur dan belanja modal yang penyerapan baru mencapai 20 persen.

Dalam situasi tertentu seperti saat ini, ketika pengeluaran atau belanja pemerintah masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, maka perlu diambil kebijakan dan diskresi yang dimiliki oleh aparat Pemda untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah.

Adanya unsur kehati-hatian dan kekuatiran untuk melakukan kesalahan administrasi yang dapat mengakibatkan implikasi hukum bagi yang bersangkutan dipandang menjadi faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Kekuatiran aparat PEMDA dalam mengelola belanja daerah, karena aktifnya kepolisian dan kejaksaan di lapangan untuk 'mencari kesalahan' pengelolaan dana di daerah.

Seyogyanya informasi penyalagunaan dana di daerah diawali dengan audit investigasi oleh BPKP dan bila dari hasil audit memang benar ditemukan permasalahan baru lah dilimpahkan ke kepolisian dan atau kejaksaan. Jika tidak demikian, maka aktifnya kepolisian dan kejaksaan ini mengakibatkan ketakutan sehingga penyerapan dana menjadi lambat, dan akhirnya menumpuk di bank.

Kiranya rapat koordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Indonesia pada tanggal 24 Agustus, dapat mendorong terciptanya kesamaan persepsi antara aparat Pemda dan aparat penegak hukum sehingga akselerasi fiskal di daerah dapat ditingkatkan.

Realisasi penyerapan anggaran yang tinggi akan menambah kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah maupun perekonomian nasional.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih dan Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Papua